

**Sandy Maulana Yusuf¹ dan
Andi Putranto²**

¹Lampau.in Jeruklegi No.123, RT/RW 12/35,
Banguntapan, Bantul, DIY; posel:
sandymaulanay@gmail.com

²Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu
Budaya, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio-
Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta, DIY;
posel: andi.fib@ugm.ac.id

Diterima 12 November 2021
Direvisi 23 November 2021
Disetujui 24 Desember 2021

ALTERNATIF MODEL PENILAIAN NILAI PENTING PADA BANGUNAN DIDUGA CAGAR BUDAYA DI KOTA DONGGALA, SULAWESI TENGAH

THE ALTERNATIVE MODEL OF SIGNIFICANT VALUES ASSESSMENT ON SUSPECTED BUILDINGS OF CULTURAL HERITAGE IN DONGGALA CITY, CENTRAL SULAWESI

Abstrak. Bangunan tua di Kota Donggala adalah bangunan bersejarah yang berasal dari periode kolonial. Akan tetapi, bangunan-bangunan ini hingga sekarang belum ditetapkan sebagai cagar budaya karena terbatasnya tenaga ahli cagar budaya di instansi kebudayaan Kota Donggala. Selain itu, metode asesmen penilaian bangunan diduga cagar budaya yang ada umumnya rumit dan tidak komprehensif. Tulisan ini bertujuan memberikan alternatif metode penilaian nilai penting yang sederhana untuk bangunan-bangunan yang diduga cagar budaya, dan dapat dipraktikkan pekerja bidang kebudayaan di instansi pemerintah lokal. Terdapat enam nilai penting yang diamati pada bangunan yaitu nilai sejarah, arsitektural, estetika, sosial, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Metode penilaian menggunakan pemberian skor pada masing-masing nilai kriteria yang ditentukan. Pemingkatan bangunan diklasifikasikan menjadi tiga peringkat yaitu utama, madya, dan minor. Bangunan yang diobservasi ialah Kantor Pusat Koperasi Kopra Daerah (PKKD) Donggala dan Gudang PKKD Donggala, dua peninggalan dari masa kolonial yang berhubungan dengan perdagangan kopra. Dari penilaian yang dilakukan diperoleh hasil yakni Kantor PKKD Donggala memiliki total skor 21 dan berperingkat madya. Gudang PKKD Donggala memiliki total skor 29 dan berperingkat utama. Dengan adanya alternatif model penilaian nilai penting yang lebih sederhana, maka diharapkan pemerintah lokal, dalam hal ini Dinas Kebudayaan yang berwenang, dapat lebih mudah melakukan asesmen awal terhadap bangunan-bangunan yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tanpa bantuan tenaga ahli.

Kata kunci: Penilaian, pemeringkatan, nilai penting, cagar budaya, Donggala

Abstract. Some old buildings in Donggala City are historical heritages from colonial period. Thus far, these buildings have not been designated as cultural heritage due to the limited number of experts in the field. In addition, assessment methods for indicated cultural heritage buildings are generally complex and not comprehensive. This research aims to provide an alternative assessment method that can be practiced by cultural workers. There are six important values observed in buildings i.e. history, architecture, aesthetic, social, scientific, and educational. This method used a score for each of those specified criteria values. Building ratings were classified into primary, intermediate, and minor. Based from the assessment, the Donggala PKKD office has a total score of 21, middle ranked. While PKKD Donggala Warehouse has a total score of 29, top ranked. This alternative model as a simpler assessment of significant values can be easily carry out by local government without the help of experts.

Keywords: Assessment, ranking, significant values, cultural heritage, Donggala

PENDAHULUAN

Bangunan tua dari masa kolonial di Kota Donggala yang diduga sebagai cagar budaya lebih banyak ditemukan daripada bangunan tua dari periode lainnya. Penentuan kriteria kelayakan sebuah bangunan tua sebagai cagar budaya selama ini telah banyak dilakukan. Masalah utama yang terjadi tidak terletak pada variabel penilaian, melainkan pada proses penilaian parameter yang

nantinya dapat berdampak pada cara analisis dan hasil penilaian terkait sejauh mana suatu bangunan layak dan memenuhi persyaratan disebut sebagai bangunan cagar budaya.

Sampai sekarang, penilaian parameter bangunan yang diduga sebagai cagar budaya lazimnya bersifat kualitatif. Hal ini mengakibatkan laporan cenderung sulit diolah untuk menghasilkan nilai-nilai mutlak. Model penilaian kuantitatif belum banyak digunakan, terutama di bidang arkeologi.

Model penilaian ini lebih banyak digunakan dalam bidang ilmu-ilmu seperti geografi, kehutanan, yang berkaitan dengan evaluasi lahan (Putranto dan Pradnyawan 2018). Dengan menggunakan model penilaian kuantitatif, setiap variabel penyusun parameter nilai penting dapat diolah secara matematis dan menggunakan statistik sederhana sehingga menghasilkan nilai yang lebih rasional, logis dan komprehensif.

Penilaian dan pemeringkatan cagar budaya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana diamanatkan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). TACB adalah kelompok pelestari yang terdiri atas tenaga ahli pelestarian yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.

Kompetensi untuk menjadi TACB umumnya diperoleh dari jenjang pendidikan di bidang arkeologi. Namun, karena terbatasnya jumlah universitas di Indonesia yang menyediakan program studi arkeologi, hal ini mengakibatkan sebaran tenaga yang kompeten di bidang pelestarian cagar budaya juga menjadi terbatas. Pada beberapa kota/kabupaten di luar Pulau Jawa, fenomena ini berimplikasi pada ketiadaan TACB di kota/kabupaten tersebut, yang salah satunya terjadi di Kota Donggala.

Penelitian ini difokuskan di Kota Donggala, kota pelabuhan tertua di wilayah pesisir Sulawesi Tengah (Suharjo 2013). Kota ini dipilih karena memiliki beberapa peninggalan budaya yang cukup unik seperti bangunan-bangunan pelabuhan yang berarsitektur kolonial, tetapi belum ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Pemerintah Republik Indonesia 2010).

Selain karena ketiadaan TACB, metode asesmen penilaian cagar budaya juga belum berkembang luas di masyarakat. Kalau pun ada, metodenya rumit dan sulit diikuti. Metode kuantitatif yang dikembangkan Achmadi, misalnya, membagi variabel pengukuran peringkat cagar budaya

menggunakan lima belas variabel bebas yang masing-masing memiliki tiga variabel terikat dan bobot-bobot spesifik (Achmadi 2014). Tujuan penelitian ini adalah memberikan alternatif metode penilaian nilai penting yang sederhana untuk bangunan-bangunan yang diduga cagar budaya sehingga dapat dipraktikkan pekerja bidang kebudayaan di instansi pemerintah lokal.

METODE

Data primer didapat melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan sejak tanggal 5 Januari 2019 hingga 26 Februari 2019 untuk melihat kondisi bangunan yang diduga cagar budaya di Kota Donggala setelah bencana gempa tahun 2018. Bangunan yang diobservasi ialah Kantor Pusat Koperasi Kopra Daerah (PKKD) Donggala dan Gudang PKKD Donggala. Data yang diamati meliputi kondisi bangunan dan keadaan lingkungan sekitar berdasarkan *checklist* di formulir survei. Wawancara dilakukan untuk melengkapi penjelasan mengenai nilai penting bangunan melalui lisan para sejarawan lokal dan ahli-ahli terkait. Proses wawancara dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara langsung dengan daftar pertanyaan terstruktur. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data tambahan mengenai riwayat bangunan kolonial yang menjadi objek penelitian.

Kajian nilai penting mengacu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu: nilai penting sejarah; ilmu pengetahuan; pendidikan; agama; dan/atau kebudayaan. Akan tetapi, mengingat basis kebudayaan yang teramat luas, maka, variabel nilai nilai estetika; nilai sosial; dan nilai arsitektural ditambahkan untuk menggantikan nilai kebudayaan (Pearson dan Sullivan 1999).

Pembuatan kriteria, nilai kriteria, dan skor pada tulisan ini mengacu evaluasi bangunan bersejarah milik Kalman yang telah disederhanakan dan dimodifikasi oleh penulis (Kalman 1980). Proses penilaian dengan metode serupa, yakni modifikasi lembar penilaian bangunan bersejarah milik Kalman, sebelumnya telah dilakukan oleh Putranto dan Pradnyawan (2018). Penyesuaian diperlukan sebab model tersebut digunakan di negara yang berbeda dengan Indonesia. Selain itu, model matematika penilaian yang digunakan

Kalman cenderung lebih mengarah kepada subjektivitas penilai (Putranto dan Pradnyawan 2018).

Proses penilaian dalam uraian Kalman dilakukan dengan melihat bangunan secara utuh, tanpa membaginya ke dalam parameter fisik yang dapat diamati seperti atap, dinding, jendela dan sistem ventilasi, pintu, dan ornamen. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian tertentu guna mendapatkan hasil yang mendetail. Berikut adalah modifikasi mekanisme penilaian yang digunakan untuk menilai nilai penting bangunan kolonial di Kota Donggala (Tabel 1).

Tabel 1 Skor Nilai Penting yang dimiliki Bangunan

Nilai Penting	Kriteria	Nilai Kriteria	Skor Nilai Penting
Sejarah	Konteks	Lokal	1
		Regional	2
		Nasional	3
	Peristiwa	Lokal	1
		Regional	2
		Nasional	3
	Tokoh	Lokal	1
		Regional	2
		Nasional	3
Arsitektural	Gaya	Sederhana	1
		Kompleks	2
	Desain	Sederhana	1
		Kompleks	2
	Konstruksi	Sederhana	1
		Kompleks	2
Estetika	Warna	Disharmonis	1
		Selaras	2
	Skala	Disharmonis	1
		Selaras	2
	Bentuk	Disharmonis	1
		Selaras	2
Sosial	Konteks	Lokal	1
		Regional	2
		Nasional	3
Ilmu pengetahuan	Relasi lintas disiplin	Sedikit	1
		Cukup	2
		Banyak	3
Pendidikan	Makna adaptif	Lokal	1
		Regional	2
		Nasional	3

Sumber: Yusuf 2020

Tingkat nilai penting lalu diklasifikasikan ke dalam tiga kelas, yaitu: tinggi, cukup, dan rendah. Klasifikasi ini didasarkan pada agregat atau penjumlahan dari skor nilai penting (Tabel 2).

Selain klasifikasi tingkat nilai penting, disusun pula klasifikasi peringkat bangunan ke dalam tiga kelas, yaitu minor, madya, dan utama, berdasarkan total skor nilai penting yang dimiliki. Dari Tabel 1, dengan penjumlahan sederhana dapat diketahui bahwa skor maksimum nilai penting yang dapat diperoleh bangunan adalah 30, dan skor minimumnya adalah 12. Kedua bilangan memiliki selisih 19, yang lalu dibagi 3 (sesuai jumlah kelas peringkat) untuk memperoleh kelas interval. Berikut adalah pemeringkatannya (Tabel 3).

Tabel 2 Klasifikasi Tingkat Nilai Penting yang dimiliki Bangunan

Nilai Penting	Rendah	Cukup	Tinggi
Sejarah	3-4	5-7	8-9
Arsitektural	3	4-5	6
Estetika	3	4-5	6
Sosial	1	2	3
Ilmu pengetahuan	1	2	3
Pendidikan	1	2	3

Sumber: Yusuf 2020

Tabel 3 Klasifikasi Peringkat Bangunan Berdasarkan Total Skor Nilai Penting

Peringkat	Total Skor
Minor	12-17
Madya	18-24
Utama	25-30

Sumber: Yusuf 2020

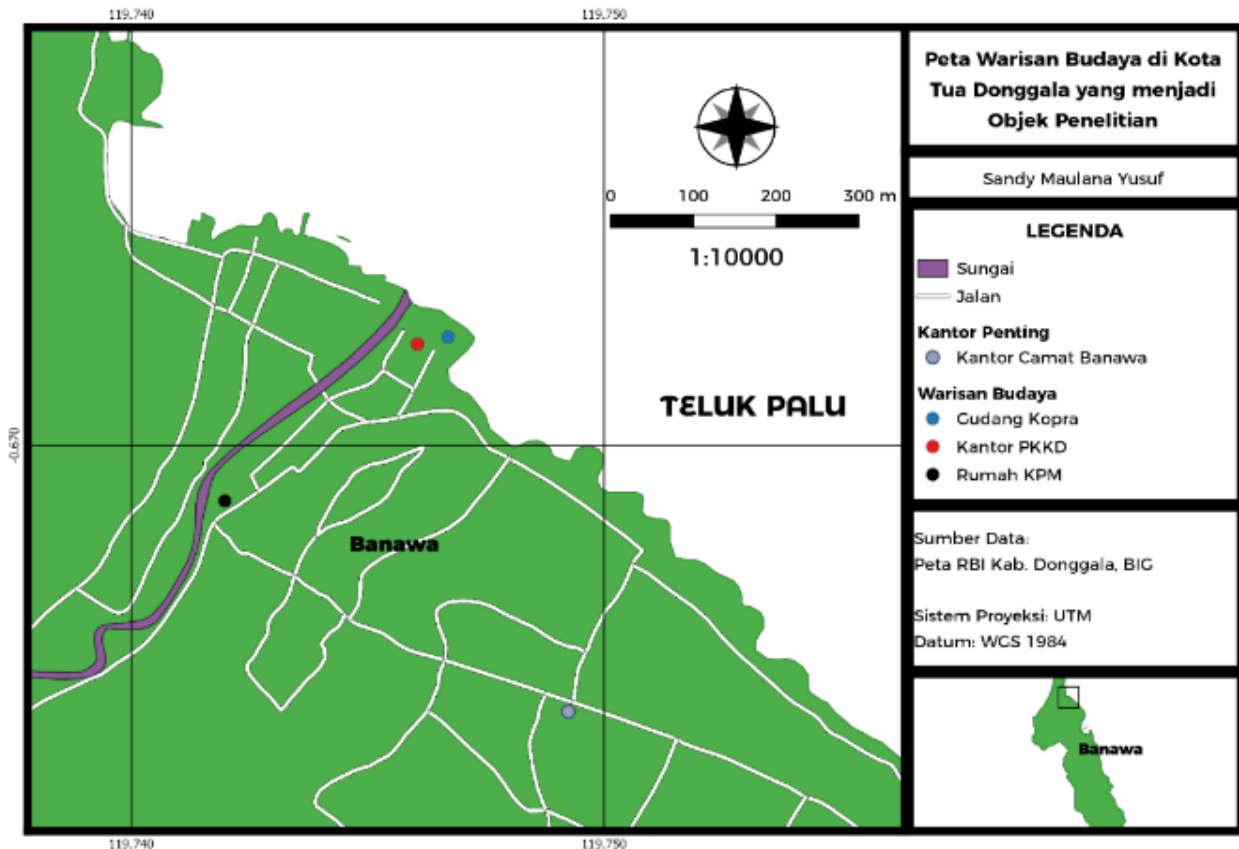
Pemberian skor bertujuan untuk menjelaskan bahwa peringkat yang diperoleh bangunan dengan menghitung total skor di akhir berasal dari gabungan dari komponen-komponen penyusun (masing-masing nilai penting), dan tidak berasal dari satu variabel penyusun saja. Pemberian nama peringkat bangunan yang berbeda dengan nomenklatur yang umum digunakan (bangunan cagar budaya peringkat kota/kabupaten, peringkat provinsi, dan peringkat nasional) dimaksudkan untuk menegaskan disparitas metode penilaian yang diajukan dengan metode yang telah dikenal sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pusat Koperasi Kopra Daerah (PKKD) Donggala

Secara administratif, kantor PKKD Donggala terletak di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa. Posisinya berada di titik koordinat $0^{\circ}40'07.1''$ LS dan $119^{\circ}44'76.3''$ BT dengan

ketinggian 3 m di atas permukaan laut ([Gambar 1](#)). Bangunan ini memiliki orientasi arah hadap timur laut–barat daya. Penanda terdekat dari kantor PKKD Donggala adalah dermaga kecil, tempat warga Tanjung Batu melabuhkan perahu yang mereka gunakan untuk memancing ikan. Aksesibilitas menuju bangunan ini tergolong sulit karena jalanan yang berlubang pascabencana tahun 2018.



Sumber: Yusuf 2020

Gambar 1 Lokasi Objek penelitian

Kantor PKKD Donggala beratap sirap dan dibangun menggunakan bahan dasar balok-balok kayu yang dipadukan ram logam (kawat yang dijalin berkotak-kotak sebagai penutup dinding). Kayu ini terdapat di banyak bagian kantor, di antaranya sebagai rangka atap, perkuatan dinding, koson jendela, dan dahan pintu. Dalam laporan inventarisasinya di tahun 2009 (tidak diterbitkan), Iksam mendeskripsikan fasad bangunan memiliki empat jendela di lantai atas dan empat jendela di lantai bawah, serta tritisan (bagian yang menjorok ke depan). Pada tritisan tersebut terdapat pintu berbentuk melengkung. Tepat di atas pintu, tercetak tulisan “Koperasi Kopra Daerah Badan Hukum No. 1960” ([Gambar 2](#)). Di sisi kiri dan kanan bangunan

terdapat empat jendela vertikal dan satu jendela horizontal, juga sebuah pintu pada masing-masing sisi bangunan.

Kantor PKKD Donggala memiliki dua lantai ([Gambar 2](#) dan [3](#)) yang terdiri dari bagian tritisan; tiga ruang kecil di bagian tengah dan satu ruang besar di lantai satu, tiga ruang kecil di lantai dua, dan bagian dapur yang terletak di belakang. Bagian tritisan yang menjadi salah satu unsur utama pembentuk fasad bangunan memiliki panjang 5,6 m dan lebar 2 m. Tiga ruang kecil di bagian tengah lantai satu memiliki panjang masing-masing 4,7 m dan lebar 4,1 m. Ruang besar di lantai satu berbentuk seperti huruf “r” memiliki panjang $\pm 10,3$ m dan lebar $\pm 9,5$ m. Bagian dapur memiliki panjang

13 m dan lebar 3 m. Sementara itu, kemungkinan besar, denah ruangan lantai dua (yang tidak dapat ditinjau karena tangga bangunan yang sudah keropos) simetris dengan lantai satu. Kantor PKKD Donggala memiliki tiga pintu, yaitu pintu lengkung di bagian tritisan, pintu di samping bangunan (sisi yang menghadap tenggara), dan pintu di bagian dapur. Bangunan ini memiliki sepuluh jendela pada fasad, dan masing-masing lima jendela pada tiap sisinya.



Sumber: Dok. Iksam 2009

Gambar 2 Fasad Kantor PKKD Donggala sebelum terdampak bencana



Sumber: Dok. Sandy Maulana Yusuf 2019

Gambar 3 Fasad Kantor PKKD Donggala pascabencana

Nilai Penting Sejarah

Nilai penting sejarah kantor PKKD Donggala memiliki konteks regional. Bangunan ini merupakan bukti fisik masa pesatnya perdagangan kopra di Pulau Sulawesi pada abad ke-20 M.

Pada abad ke-20 M, tuntutan terhadap produk baru di luar sektor agraris dari dunia yang di masa itu tengah dilanda arus industrialisasi besar-

besaran, memaksa pemerintah Belanda di Den Haag menetapkan kebijakan baru di bidang ekonomi dan mengalihkan eksploitasinya ke luar Jawa. Di Donggala, proses tersebut berhasil diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Komoditas yang dijadikan prioritas utama adalah kopra. Bersamaan dengan intensifikasi perdagangan kopra di Manado dan Makassar, pemerintah kolonial juga mencoba mencari pasokan kopra dalam jumlah memadai dari Donggala (Nadjamuddin dkk. 2016). Pada tahun 1900, Donggala memasok 13.982 ton kopra ke Makassar dan 10.296 ton ke Manado dan Gorontalo (Hasan 2000). Jumlah tersebut terus bertambah. Terlebih setelah Belanda dan negara-negara Eropa lain mulai mendirikan perusahaan pengolah kopra atau perusahaan eksportir kopra di Sulawesi Selatan.

Konglomerasi terbesar yang menguasai perdagangan kopra di seperempat awal dekade abad ke-20 adalah Olie Fabrieken Insulinade (OFI). OFI merupakan perusahaan minyak Hindia Belanda yang beroperasi di Makassar sejak tahun 1913. Perusahaan ini mengolah kopra menjadi minyak kelapa. Minyak-minyak itu kemudian dijual di pasar Eropa. Pada tahun 1924–1926, OFI mengekspor 34,63 juta liter minyak kelapa ke Eropa (Nur 2017). Suplai kopra yang nantinya akan diekspor OFI atau pun perusahaan asing lain melalui Pelabuhan Makassar berasal dari dataran pantai Selayar, pantai Donggala, dan Kepulauan Sangir (Nur 2017).

Kesuksesan OFI dan para eksportir kopra terus bertahan sampai tiba masa depresi ekonomi pada tahun 1930. Pada masa tersebut, harga kopra yang awalnya berada di kisaran f. 12–f. 13 per pikul, turun drastis menjadi hanya f. 4–f. 5 per pikulnya (Nur 2017). Meski harga kopra sempat naik pada tahun 1936 dan 1937, pada tahun 1939, harga kopra kembali merosot, yakni menjadi f. 3,9 setelah Eropa Barat, konsumen terbesar kopra Sulawesi, dilanda perang (Asba 2007). Hal inilah yang menjadi penyebab lahirnya *Stichting Het Coprafonds* 'Dana Kopra'.

Kantor PKKD Donggala dahulunya merupakan aset milik *Stichting Het Coprafonds* 'Dana Kopra', lembaga yang dibentuk Belanda pada tahun 1940 untuk mengatur pembelian dan penjualan kopra, dalam arti memborong dan menimbun kopra dari petani, sehingga harga kopra dapat dikendalikan. Setelah kemerdekaan,

Coprafonds kemudian dinasionalisasi pemerintah Indonesia pada tahun 1954, dan beralih nama menjadi Yayasan Kopra (Asba 2007).

Sementara untuk kriteria peristiwa dan tokoh, kantor PKKD Donggala terkait dengan peristiwa atau tokoh sejarah dengan skala lokal, yakni La Parenrengi Lamarauna, Raja Banawa yang berkuasa dari kurun 1942–1959. Sebagai raja terakhir dari sebuah kerajaan yang telah bertahan lebih dari 400 tahun, La Parenrengi harus rela menyaksikan kopra Donggala diperjualbelikan oleh otoritas di luar Kerajaan Banawa. Keberadaan kantor PKKD Donggala menandai penguasaan penuh Belanda terhadap sumber daya dan komoditas lokal Donggala, yaitu kopra.

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai sejarah kantor PKKD adalah 5 (cukup). Nilai penting sejarah kantor PKKD Donggala tampak di satu parameter yang dapat diamati, yaitu ornamen bertulis “Koperasi Kopra Daerah Badan Hukum No. 1960” yang terletak di bagian tritisan. Dalam artikel ini, kajian pustaka digunakan untuk melengkapi narasi kesejarahan bangunan.

Nilai Penting Arsitektural

Nilai penting arsitektural kantor PKKD Donggala memiliki gaya, desain, dan konstruksi yang seluruhnya kompleks. Arsitektural kantor PKKD Donggala mencirikan gaya *international style* (gaya arsitektur kolonial modern), yang dalam tulisan ini dikategorikan sebagai gaya kompleks. Ciri utama arsitektur ini ialah bangunan yang dihasilkan telah disesuaikan dengan iklim serta teknologi masyarakat setempat (Gaputra 2019).

Terdapat enam karakteristik bangunan bergaya *international style* yang kerap dijumpai di Indonesia, yakni: penggunaan atap datar dari bahan beton, pemakaian gevel horizontal, mulai menggunakan besi cor, pemakaian bahan kaca dalam jumlah yang besar (terutama pada jendela), dominan memakai warna putih, dan dinding hanya berfungsi sebagai penutup (Purnomo dkk. 2017). Pada kantor ini, gaya arsitektur *international style* tampak dari penggunaan atap datar dan penggunaan kaca pada jendela.

Desain kantor juga tergolong kompleks. Hal ini tampak dari penggunaan pintu lengkung di bagian tritisan bangunan. Pintu lengkung adalah salah satu ciri khas arsitektur Eropa. Orang Eropa kerap memakai bentuk lingkaran, entah itu utuh

atau setengah lingkaran, di tiap bangunan yang mereka dirikan (Sidharta dan Budiharjo 1989).

Kompleksitas desain kantor PKKD Donggala dapat diamati dari bukaan ventilasi menyeluruh pada lantai atas yang seakan memisahkan atap dengan dinding bangunan (Isnaeni dan Pagessa 2013). Penggunaan sistem ventilasi ini, berdasarkan penuturan Zulkifly Pagessa, merupakan bentuk adaptasi arsitek Belanda terhadap kondisi dan suhu tropis pesisir Donggala.

Konstruksi kantor yang memakai bahan dasar kerangka balok kayu dan kemudian dipasang ram dari logam di kedua sisinya, yang setelahnya dilapisi kembali dengan kapur, merupakan indikator yang menjadi alasan kategorisasi Kantor PKKD Donggala sebagai bangunan dengan sistem konstruksi kompleks. Buyung, warga Tanjung Batu, menjelaskan bahwa bangunan ini dibuat dari struktur kerangka balok kayu. Lalu, kayu-kayu tersebut dipasang ram dari logam di kedua sisinya. Kemudian, ram logam ini dilapisi kembali dengan kapur sehingga membentuk dinding dengan total tebal ± 5 cm.

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai arsitektural kantor PKKD Donggala adalah 6 (tinggi). Nilai penting bangunan ini tampak pada seluruh parameter yang dapat diamati secara fisik yakni atap; dinding; pintu; jendela dan sistem ventilasi; serta ornamen. Uraian nilai arsitektural diperoleh dari hasil observasi yang didukung data pustaka dan wawancara.

Nilai Penting Estetika

Nilai penting estetika kantor PKKD Donggala tercermin dari warna, skala, dan bentuk bangunannya yang seluruhnya selaras. Warna *beige* yang terdapat pada dinding bangunan berpadu harmonis dengan warna cokelat keabu-abuan yang tersebar pada atap, dahan pintu, dan dahan jendela.

Kantor ini juga tampak selaras dari perspektif skala bangunan. Denahnya berukuran hampir persegi. Sementara ukuran detail bangunan seperti jendela, pintu, dan keletakan masing-masing detail tampak seimbang dan dalam proporsi jumlah yang sama. Seperti halnya jumlah jendela di sisi kanan dan kiri bangunan yang sama-sama berjumlah empat jendela tinggi dan satu jendela melebar.

Bila ditinjau dari perspektif lain, yakni bentuk, kaitannya dengan bangunan lain yang tersebar di Donggala, maka kantor PKKD Donggala tergolong

selaras. Penggunaan sirap dan teknik konstruksi dengan kerangka balok kayu membuat bangunan ini tampak tidak asing dengan bangunan-bangunan bermasa kolonial lain yang berada di sekitar pelabuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai estetika kantor PKKD Donggala adalah 6 (tinggi). Nilai penting bangunan ini tampak pada seluruh parameter yang dapat diamati secara fisik yakni atap; dinding; pintu; jendela dan sistem ventilasi; serta ornamen. Uraian nilai estetika diperoleh dari hasil observasi.

Nilai Penting Sosial

Nilai penting sosial kantor PKKD Donggala memiliki konteks lokal, yakni sebagai bukti fisik dari kekerasan alineatif dan penindasan struktural yang dilakukan pedagang Tionghoa terhadap petani kelapa Donggala pada abad ke-20 M.

Kopra adalah komoditas multinilai. Dari kopra, dinamika interaksi dan hierarki sosial masyarakat Donggala dapat diamati (Nadjamuddin dkk. 2016). Selain multinilai, kopra juga merupakan komoditas multipelaku. Itu berarti ada banyak pihak yang ikut terlibat dalam alur perdagangan kopra. Baik dari hulu industri (perkebunan kelapa) hingga tiba di hilirnya: pasar Eropa. Salah satu pelaku terpenting di alur panjang perdagangan kopra Indonesia Timur adalah orang Tionghoa. Mereka berperan sebagai perantara pihak eksportir (perusahaan Eropa) dan produsen bahan baku (pribumi pemilik kebun kelapa).

Pada masa pendudukan Belanda setelah abad ke-19 M, umumnya kelapa sebagai bahan baku kopra ditanam sendiri oleh pribumi. Ada pula sedikit yang ditanami perkebunan milik perusahaan. Di beberapa kasus tertentu, pedagang Tionghoa menyewa pohon kelapa kepada pribumi dalam jangka waktu panjang untuk dikelola mandiri panennya. Ketika tiba masa panen, kopra yang telah siap jual dikemas menggunakan karung goni. Kopra-kopra ini kemudian dikapalkan ke Makassar. Pajak transit angkutan diserahkan kepada petugas komisi yang duduk di kapal. Tidak lupa uang muka kopra dibayarkan pula oleh petugas bersangkutan. Setelah kopra tiba di Makassar, sebagian di antaranya diolah menjadi minyak kelapa terlebih dahulu sebelum dijual di Eropa. Sebagian lain diekspor langsung dalam bentuk kopra (Nur 2017).

Di Donggala, H.T. Lanting mencatat dalam memorie-nya di bulan April 1939, para pedagang Tionghoa diberi izin untuk menampung penyeteroran kopra dari penduduk untuk kemudian diangkut menuju Pelabuhan Donggala. Namun, Belanda melarang orang-orang Tionghoa mengelola sendiri perkebunan kelapa. Belanda khawatir apabila hal tersebut diperbolehkan maka akan muncul gejolak di kalangan penduduk pribumi. Untuk itu orang-orang Tionghoa hanya diizinkan mengelola toko (Rim dkk. 2012).

Meskipun hanya membuka toko, Gubernur Jenderal Petrus Gerardus van Overstraten mengungkapkan pedagang Tionghoa tetap menghisap darah pribumi (Asba 2007). Cukong Tionghoa yang menguasai perdagangan kopra di Donggala pada masa itu bernama Nio Bio Tjie (Heersink 1994). Nio Bio Tjie bersama para pedagang Tionghoa lain mengikat pribumi yang kebanyakan adalah petani kelapa melalui pinjaman uang muka dengan bunga 1–5% per tahun. Selain memberi pinjaman uang muka, untuk menjaga kelangsungan hubungan pedagang Tionghoa dan petani kelapa, pedagang Tionghoa juga mengikat petani dengan memberi pinjaman berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga (Asba 2007). Petani lalu diharuskan menyetorkan kopra kepada pedagang Tionghoa sebagai cara mereka membayar hutang belanja barang kebutuhan rumah tangga di toko orang Tionghoa. Dari sini pedagang Tionghoa memperoleh keuntungan ganda.

- 1) Menerima pasokan kopra dengan harga murah yang dapat dijual kembali dengan harga tinggi sebagai komoditas ekspor;
- 2) Memungut laba dari barang-barang kebutuhan rumah tangga yang mereka jual kepada pribumi (Rim dkk. 2012).

Apa yang dialami para petani kelapa Donggala, dalam tajuk kapitalisme, dapat dimaknai sebagai kekerasan alineatif dan penindasan struktural. Fenomena ini cenderung menyebabkan seseorang disisihkan dan tidak memiliki daya mengambil keputusan mengenai orientasi kehidupan pribadi dan sosialnya sendiri (Salmi 2003). Dependensi berlebihan yang terjalin antara orang Tionghoa sebagai pemilik modal dan petani kelapa yang hanya sekadar konsumen, terlebih dengan adanya unsur tipu daya (minim transparansi mengenai harga kopra sebagai komoditas ekspor),

menyebabkan petani kelapa Donggala berada di posisi timpang. Jika dilihat kembali menggunakan kaca mata yang lebih luas, fenomena kekerasan alinear dan penindasan struktural yang dialami pribumi merupakan imbas rasisme yang diterapkan pemerintah Belanda. Selama menjajah Indonesia, pemerintah kolonial membagi masyarakat ke dalam tiga golongan berdasarkan ras dan warna kulit. Golongan pertama yang mendapat banyak sekali privilese, bangsa Eropa. Golongan kedua, ras timur asing (Tionghoa, Arab, dan India). Golongan terakhir dan yang menempati dasar strata, pribumi (Prayudi dan Salindri 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai sosial kantor PKKD Donggala adalah 1 (rendah). Nilai penting bangunan ini tidak ada yang tampak pada parameter yang dapat diamati secara fisik. Uraian nilai sosial diperoleh dari studi pustaka.

Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Nilai penting ilmu pengetahuan kantor PKKD Donggala memiliki relasi lintas disiplin yang banyak. Ditinjau dari perspektif ilmiah, kantor PKKD Donggala dapat memperkaya keilmuan tiga kajian, yaitu *disaster risk management*, konservasi arkeologi, dan arsitektur. Hingga kini, kajian arkeologis di Donggala masih jarang dilakukan. Padahal kota ini memiliki banyak bangunan kolonial diduga cagar budaya yang perlu ditelaah. Kantor PKKD Donggala adalah salah satu di antaranya. Setelah dihantam bencana alam pada akhir September 2018, timbul urgensi mengkaji kantor PKKD Donggala dari perspektif *disaster risk management*. Hal ini diperlukan untuk menilai kondisi bangunan pascabencana. Arkeologi dapat kembali menyumbangkan perspektif konservasi untuk merumuskan strategi demi menjaga kelestarian bangunan. Selain dua kajian tersebut, kantor PKKD Donggala juga menarik dikaji dari perspektif arsitektural. Bangunan ini mencirikan arsitektur *international style* yang jarang dijumpai di Donggala.

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai ilmu pengetahuan kantor PKKD Donggala adalah 3 (tinggi). Nilai penting bangunan ini tampak pada seluruh parameter yang dapat diamati secara fisik. Uraian nilai ilmu pengetahuan diperoleh dari hasil observasi yang didukung data pustaka.

Nilai Penting Pendidikan

Nilai penting pendidikan kantor PKKD Donggala memiliki makna adaptif dalam skala lokal. Bukti fisik yang dapat menarasikan relasi timpang antara pribumi Donggala dan pedagang Tionghoa. Narasi yang dihasilkan, sebagaimana niat dan harap-harap baik yang perlu diteruskan bangunan kolonial, tentunya berputar di nilai moral apa yang dapat diambil. Kantor PKKD Donggala dapat digunakan sebagai objek guna mendidik serta menumbuhkan cinta, peduli dan sikap asih terhadap sesama terlepas dari ras yang mereka miliki. Agar relasi timpang antara pribumi Donggala dan pendatang Tionghoa yang pernah terjadi di masa lalu tidak kembali terulang.

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai pendidikan kantor PKKD Donggala adalah 1 (rendah). Nilai penting bangunan ini tidak ada yang tampak pada parameter yang dapat diamati secara fisik. Uraian nilai pendidikan diperoleh dari studi pustaka.

Gudang Kopra PKKD Donggala

Secara administratif, gudang kopra milik PKKD Donggala terletak di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa. Posisinya berada di titik koordinat 0°40'06.2" LS dan 119°44'0.2" BT dengan ketinggian 3 m di atas permukaan laut (Gambar 1). Gudang ini memiliki orientasi arah hadap tenggara-barat laut. Penanda terdekat dari gudang kopra, karena praktis letaknya bersebelahan dengan kantor PKKD, ialah Dermaga Kecil Tanjung Batu.

Pada tampak depan dan belakang gudang, terdapat masing-masing sebuah pintu dan dua jendela (Gambar 4). Gudang kopra dibangun menggunakan rangka besi yang ditutupi seng (Gambar 5). Gudang ini terdiri dari tiga bangunan yang masing-masingnya berupa satu ruang memanjang berukuran ±75 m dan lebar 12,5 m. Terkecuali bangunan gudang yang terletak paling barat laut (Gudang 3) yang sudah diganti dengan bangunan berbahan semen dan memiliki rancang bangun layaknya rumah-rumah pada umumnya: berfasad segi empat mengikuti atap berbentuk segitiga.



Sumber: Dok. Stephanie Claussie 2017

Gambar 4 Fasad Gudang PKKD Donggala



Sumber: Dok. Stephanie Claussie 2017

Gambar 5 Tampak samping Gudang PKKD Donggala

Nilai Penting Sejarah

Nilai penting sejarah gudang kopra PKKD Donggala memiliki konteks nasional. Bangunan ini mampu menjadi bukti fisik perjuangan Indonesia dalam menjaga kedaulatannya, yakni berada pada satu konteks masa yang sama dengan pergolakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada tahun 1950-an. Tidak hanya satu konteks, gudang kopra juga menjadi lokasi terjadinya peristiwa dengan skala nasional yaitu pengeboman kapal milik serdadu TNI oleh pesawat bomber Permesta yang diterbangkan Allan Pope.

Pascakemerdekaan, perjalanan Indonesia menjadi negara yang sepenuhnya berdaulat tidak benar-benar mulus. Empat tahun setelah proklamasi, Belanda bersama pasukan sekutu masih terus saja merongrong kemerdekaan tanah air. Berbagai pertempuran tidak dapat dielakkan sampai akhirnya pada tahun 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia lewat Konferensi Meja Bundar.

Usikan dari luar jelas telah usai, namun bukan berarti keadaan internal Indonesia benar-

benar tentram. Dalam dekade 1950-an hingga 1960-an, pemberontakan Permesta berlangsung di Sulawesi. Diprakarsai oleh perwira seperti Letkol Ventje Sumual, gerakan yang awalnya muncul sebagai protes akibat pembangunan yang tidak merata dan terlalu terpusat di Jawa, perlahan berubah menjadi konflik bersenjata yang menimbulkan banyak korban sipil.

Gudang kopra PKKD Donggala adalah saksi konfrontasi armada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Permesta. Pada April 1958, empat kapal yang mengangkut persediaan makanan dan amunisi perang milik TNI tenggelam akibat serangan udara Permesta. Jamrin Abubakar dalam bukunya “Donggala: Donggala'ta dalam Pergulatan Zaman, di antara Catatan Sejarah dan Budaya yang Terlupakan”, mewawancarai Abdul Djalil, tetua Kota Donggala guna merekonstruksi peristiwa ini.

Abdul Djalil menceritakan pada Jumat, 27 April 1958 pukul 21.00 WITA, kapal Moro, kapal berkapasitas sekitar 1800 ton yang memuat pasukan Brawijaya 516 dan logistik militer tiba dan berlabuh di muara sungai Donggala, tidak jauh dari gudang kopra milik PKKD Donggala. Keesokan paginya, hanya beberapa jam setelah kapal buang jangkar, Moro karam setelah dibom oleh Allan Pope, pilot pesawat Mustang Bomber B-26 sekaligus agen Central Intelligence Agency (CIA). Tak hanya Moro, pada hari yang sama Allan Pope juga membom dua kapal lain, yaitu Nuburi dan Giliraja.

Minggu 29 April 1958, pesawat bomber yang diterbangkan Allan Pope kembali melintas di langit Kota Donggala. Tujuannya kini menenggelamkan kapal Mutiara yang tengah berlabuh di pelabuhan. “Pada pemboman hari itu, meski tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi dampak yang ditimbulkan serangan Permesta teramat parah. Sebab, selain menembaki kapal Mutiara, Allan Pope juga memporak-porandakan sebagian bangunan yang berada di area pelabuhan—termasuk separuh gudang 3 yang akhirnya dibangun kembali dengan bahan semen dan kayu,” kenang Djalil (Abubakar 2013).

Bila ditinjau dari kriteria tokoh, Gudang PKKD Donggala terkait dengan tokoh sejarah dengan skala nasional, yakni Allan Pope. Allan sendiri merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Ia adalah pilot yang bekerja untuk CIA, badan intelijen Amerika Serikat. Penangkapan Allan Pope

pada tahun 1958 oleh militer Indonesia seakan menegaskan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Permesta. Sesuatu yang telah mereka sangkal selama beberapa bulan sebelumnya. Penangkapan Allan Pope juga mengubah sikap Amerika Serikat terhadap Indonesia. Embargo senjata terhadap Indonesia dihapus. Amerika Serikat berharap niat baik ini bakal membuat Soekarno, Presiden Indonesia kala itu, menjaga mulutnya. Penangkapan Allan Pope juga menjadi akhir dukungan Amerika kepada gerakan Permesta.

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai sejarah Gudang PKKD Donggala adalah 9 (tinggi). Nilai penting sejarah bangunan ini tampak di empat parameter yang dapat diamati secara fisik, yaitu atap, jendela dan sistem ventilasi, dinding, serta pintu, yang kesemuanya menjadi saksi peristiwa penenggelaman kapal serdadu TNI oleh pesawat bomber Permesta. Kajian pustaka digunakan untuk melengkapi narasi kesejarahan bangunan.

Nilai Penting Arsitektural

Nilai penting arsitektural Gudang PKKD Donggala memiliki gaya, desain, dan konstruksi yang seluruhnya kompleks. Arsitektural gudang kopra PKKD Donggala mencirikan gaya arsitektur kolonial modern berupa bangunan bertipe *knock down* (bongkar pasang), yang dalam tulisan ini dikategorikan sebagai gaya kompleks. Dugaan bahwa gudang kopra milik PKKD Donggala merupakan bangunan bertipe *knock down* didasarkan Zulkifly Pagessa dari kesamaan bentuk dari gedung-gedung kopra yang ditemui di wilayah lain seperti Gorontalo, Toli-Toli, dan Maluku Utara, meski gudang-gudang tersebut kini hanya tersisa satu dan kondisinya tidak terawat.

Desain dan konstruksi gudang juga tergolong kompleks. Hal tersebut tampak dari penggunaan konstruksi lengkung (berbentuk separuh silinder) yang dibangun dengan memakai rangka logam dan bahan seng. Penggunaan bentuk dan bahan konstruksi seperti ini memungkinkan gudang memerangkap panas dari sinar matahari sehingga memaksimalkan proses pengeringan kopra. Konsep demikian pada masa modern dapat dijumpai pada rumah kaca. Dengan keberadaan gudang yang selain menjadi tempat penyimpanan, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pengeringan kopra, kopra dapat terhindar hujan. Apabila kopra tergujur hujan, kualitas kopra akan

turun karena air hujan dapat membuat kopra berganti warna menjadi cokelat atau abu-abu, yang berdampak pada merosotnya harga jual kopra (Asba 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai arsitektural Gudang PKKD Donggala adalah 6 (tinggi). Nilai penting bangunan ini tampak pada dua parameter yang dapat diamati secara fisik yakni rangka dan atap. Uraian nilai arsitektural diperoleh dari hasil observasi yang didukung data pustaka dan wawancara.

Nilai Penting Estetika

Nilai penting estetika Gudang PKKD Donggala tercermin dari warna dan skala strukturnya yang selaras. Warna merah kecokelatan yang tampak di badan gudang berpadu harmonis dengan aksen putih dan hijau yang tersebar pada fasad dan bagian belakang gudang.

Gudang ini juga tampak selaras dari perspektif skala bangunan. Denah ketiga gudang berukuran serupa. Sementara ukuran detail bangunan seperti pintu, jendela dan keletakan masing-masing detail tampak seimbang dan dalam proporsi jumlah yang sama. Seperti halnya jumlah jendela di fasad gudang 1, gudang 2, dan gudang 3 yang sama-sama berjumlah dua.

Bila ditinjau dari perspektif lain, yakni bentuk, kaitannya dengan bangunan lain yang tersebar di Donggala, maka gudang kopra PKKD Donggala tergolong disharmonis. Penggunaan bahan sepenuhnya logam sebagai konstruksi gudang, juga bentuknya yang separuh silinder, terlihat kontras dengan bangunan-bangunan bermasa kolonial lain yang berada di sekitar pelabuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai estetika Gudang PKKD Donggala adalah 5 (cukup). Nilai penting bangunan ini tampak pada seluruh parameter yang dapat diamati secara fisik yakni atap; dinding; pintu; jendela dan sistem ventilasi; serta ornamen. Uraian nilai estetika diperoleh dari hasil observasi.

Nilai Penting Sosial

Nilai penting sosial Gudang PKKD Donggala memiliki konteks nasional. Gudang ini adalah saksi sentimen sosial masyarakat Donggala dan Pulau Sulawesi terhadap kebijakan pemerintah pusat era 50-an yang merugikan rakyat di daerah produsen kopra.

Pergolakan dalam negeri Indonesia pada masa Demokrasi Liberal hingga akhir masa Demokrasi Terpimpin tidak dapat terlepas dari polarisasi yang timbul setelah pemilihan umum (pemilu) pertama Indonesia pada tahun 1955. Polarisasi ini disebabkan hasil pemilu yang cenderung tidak representatif. Berdasarkan statistik Panitia Pemilihan Indonesia per 30 Oktober 1954, 66,2% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa dengan jumlah 55.637.552 orang, sementara total penduduk seluruh Indonesia kala itu adalah 77.987.789 orang (Maulida 2018). Ketika mayoritas parlemen diisi oleh suatu kelompok tertentu, maka yang timbul setelahnya adalah kebijakan yang timpang.

Ketimpangan keberpihakan pemerintah juga berpengaruh pada kebijakan perdagangan kopra. Kopra adalah urat nadi perekonomian Indonesia Timur. Apabila kopra tidak memiliki harga jual yang baik, maka rakyat menderita (Lumangino 2017). Pertanyaan yang sering muncul ialah seberapa jauh penduduk Indonesia Timur menikmati penghasilannya dari ekspor kopra? Asba (2007) menjabarkan, dalam periode tahun 1935-1939, rata-rata pemakaian minyak lemak dunia sekitar 6.53 juta ton metrik per tahun. Dari jumlah itu, 1,29 juta ton berasal dari minyak kelapa. Minyak kelapa menggunakan bahan dasar kopra sebanyak sekitar 2 juta ton per tahun. Sementara dari 2 juta ton kopra dunia setiap tahunnya, sekitar 500 ribu ton di antaranya berasal dari Hindia Belanda. Dari jumlah itu, sekitar 300 ribu ton berasal dari Indonesia Timur.

Pascapembubaran Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, pemerintah Indonesia ingin tata niaga kopra beralih menjadi sumber pendapatan negara. Oleh karenanya, kantor pusat *Coprafonds* di Makassar harus dipindahkan ke Jakarta agar memudahkan pengawasan negara. Kebijakan itu tentu saja ditentang oleh kelompok-kelompok regional di Indonesia Timur (Asba 2007). Menurut Sutter (1959), pemindahan kantor pusat *Coprafonds* membuat tata niaga kopra di wilayah Indonesia Timur menjadi tidak jelas.

Pada pertengahan tahun 1950, dibentuk Komisi Kopra untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah terkait kopra. Komisi Kopra kemudian memutuskan *Coprafonds* dipindahkan ke Jakarta, maka di setiap wilayah produsen kopra perlu dibentuk Badan Koperasi Kopra Daerah. Inilah cikal

bakal keberadaan Kantor dan Gudang PKKD di Donggala (Asba 2007). Keputusan Komisi Kopra tidak langsung menyelesaikan akar permasalahan kopra di Indonesia Timur. Bahkan, isu yang semula hanya merupakan isu ekonomi berkembang menjadi isu politik berupa perlawanan daerah terhadap pemerintah pusat di Jakarta (Asba 2007). Isu tersebut lantas disemai perwira-perwira militer Sulawesi. Kegagalan pembangunan ekonomi dan keberpihakan kebijakan ekonomi yang timpang, lalu ditambah alokasi keuangan bagi operasi militer yang makin sempit serta pengabaian terhadap kesejahteraan prajurit, jelas saja membuat gerah perwira di berbagai wilayah (Maulida 2018).

Jumat, 2 Maret 1957, pada pukul 03.00 dini hari di Makassar, Letkol Ventje Sumual membacakan naskah proklamasi dalam situasi yang disebutnya *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB), artinya: negara dalam keadaan darurat perang. Proklamasi inilah yang kemudian menandai gerakan serius bernama Permesta. Gerakan ini didukung oleh kebanyakan sipil sebab basis kritik yang disampaikan Sumual dan Permesta adalah penguasaan modal yang berlebihan oleh negara sedangkan daerah tidak mendapat apa-apa.

Kopra berada di pusaran intrik politis dan ekonomis tersebut. Tuntutan yang kerap digaungkan, yakni pembagian hasil penjualan kopra (30% untuk pusat dan 70% untuk daerah produsen, salah satunya Donggala) tidak pernah ditanggapi secara serius (Rasyid 2017). Oleh rakyat dan Permesta, kopra kemudian dijual secara ilegal. Keuntungan dari penjualan tersebut dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang tidak tersentuh negara, seperti perbaikan jalan dan pembangunan jembatan. Selain itu, profit juga dipakai untuk mengimpor bahan-bahan makanan, tekstil, alat pertanian, dan membiayai operasi militer Permesta (Asba 2007; Lumangino 2017).

Operasi militer Permesta yang sarat maksud politis dan terdapat intervensi asing hanya menyengsarakan rakyat. Ribuan sipil tewas dalam pemberontakan ini. Gerakan Permesta juga menunjukkan kegagalan pemerintah Indonesia di dekade 50-an untuk mendengar suara-suara di luar Jakarta. Fenomena ini dapat digolongkan sebagai kekerasan simbolik di mana negara sebagai penguasa mengakumulasi kepemilikan modal dan membungkusnya dengan pemalsuan realitas atau ilusi kolektif (Haryatmoko 2016). Dalam hal ini,

pemerintah pusat seakan meninabobokan rakyat di wilayah produsen kopra (salah satunya Donggala) bahwa pemindahan pusat *Coprafonds* dan pemutusan segala relasi dengan pihak asing ialah demi penguasaan modal oleh pribumi. Pun dengan tuntutan pembagian hasil penjualan kopra (30% untuk pusat dan 70% untuk daerah produsen) yang tidak serius ditanggapi. Rasyid (2017) menjelaskan, seharusnya, dalam mengambil kebijakan yang terkait daerah, terlebih mengenai sumber daya modal yang menjadi hajat hidup banyak rakyat, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah perlu memberikan otonomi kepada daerah dikarenakan daerahlah yang lebih memahami aspirasi dan keinginan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai sosial Gudang PKKD Donggala adalah 3 (tinggi). Nilai penting bangunan ini tidak ada yang tampak pada parameter yang dapat diamati secara fisik. Uraian nilai sosial diperoleh dari studi pustaka.

Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Nilai penting ilmu pengetahuan Gudang PKKD Donggala memiliki relasi lintas disiplin yang banyak. Ditinjau dari perspektif ilmiah, bangunan ini dapat memperkaya keilmuan tiga kajian, yaitu *disaster risk management*, konservasi arkeologi, dan arsitektur.

Dampak yang muncul akibat bencana alam pada akhir September 2018 menimbulkan urgensi kajian Gudang PKKD Donggala dari perspektif *disaster risk management*. Terlebih setelah sebagian gudang tenggelam ke dasar laut akibat fenomena tanah amblas. Perspektif *disaster risk management* diperlukan untuk menilai kondisi bangunan pascabencana dan keamanan wilayah.

Arkeologi juga dapat menyumbangkan perspektif konservasi untuk merumuskan strategi demi menjaga kelestarian nilai penting bangunan dan memulihkannya. Pendekatan arsitektur diperlukan untuk menempatkan gudang kopra dalam linimasa perkembangan arsitektur prafabrikasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai ilmu pengetahuan Gudang PKKD Donggala adalah 3 (tinggi). Nilai penting bangunan ini tampak pada seluruh parameter yang dapat diamati secara fisik. Uraian nilai ilmu pengetahuan diperoleh dari hasil observasi yang didukung data pustaka.

Nilai Penting Pendidikan

Nilai penting pendidikan Gudang PKKD Donggala memiliki makna adaptif dalam skala nasional. Bukti fisik yang dapat mengingatkan masyarakat agar senantiasa bersikap kritis terhadap apa-apa yang diputuskan pemerintah serta menarasikan urgensi suara-suara dari wilayah di luar pusat pemerintah.

Seperti halnya yang diceritakan George Orwell dalam *Animal Farm*, kuasa terhadap modal adalah candu. Kalimat ini mengejawantah benar-benar dalam kasus kopra Donggala. Indonesia yang baru berdaulat pada tahun 1945, setelah lunas diperas berabad-abad oleh bangsa lain, ingin merasakan kuasa terhadap sumber daya yang menghasilkan pundi-pundi uang. Pada masa tersebut, kopra adalah komoditas yang memiliki posisi tawar dalam percaturan ekonomi dan politik bangsa. Keinginan berlebih pemerintah Indonesia untuk menguasai kopra dimulai dengan memindahkan kantor pusat *Coprafonds* dari Makassar ke Jakarta pada tahun 1950. Meski keputusan ini ditentang oleh banyak pedagang dan petani kopra Sulawesi, pemerintah berargumen bahwa ini demi penguasaan modal oleh pribumi. Sebuah ilusi kolektif. Mirip dengan narasi yang diciptakan Napoleon, tokoh fiksi berwujud babi dalam novel Orwell, bahwa setiap yang berkaki dua—merujuk pada pemilik peternakan yang senantiasa memperbudak hewan adalah musuh, dan setiap yang berkaki empat atau memiliki sayap adalah teman.

Dua ilusi ini memiliki benang merah serupa, yakni sama-sama disampaikan demi menutupi maksud yang dituju, dan berakhir dengan revolusi mengangkat senjata. Selepas kantor pusat *Coprafonds* dipindah, jejaring perdagangan kopra di Sulawesi menjadi berantakan. Setelahnya, hanya sedikit dari profit perdagangan kopra yang kembali ke wilayah produsen. Sama halnya dengan Napoleon yang menjadi diktator baru di peternakan pasca keberhasilan para binatang melengserkan pemilik peternakan.

Berdasarkan uraian tersebut, total skor nilai pendidikan Gudang PKKD Donggala adalah 3 (tinggi). Nilai penting bangunan ini tidak ada yang tampak pada parameter yang dapat diamati secara fisik. Uraian nilai pendidikan diperoleh dari studi pustaka.

Tabulasi dan Pemingkatan

Dari uraian masing-masing nilai penting, berikut adalah tabulasi total skor nilai penting yang dimiliki kantor PKKD Donggala (Tabel 4) dan Gudang PKKD Donggala (Tabel 5).

Tabel 4 Skor nilai penting Kantor PKKD Donggala

Nilai Penting	Kriteria	Nilai Kriteria	Skor Nilai Penting
Sejarah	Konteks	Regional	2
	Peristiwa	Lokal	1
	Tokoh	Lokal	1
Arsitekural	Gaya	Kompleks	2
	Desain	Kompleks	2
	Konstruksi	Kompleks	2
Estetika	Warna	Selaras	2
	Skala	Selaras	2
	Bentuk	Selaras	2
Sosial	Konteks	Lokal	1
Ilmu pengetahuan Pendidikan	Relasi lintas disiplin Makna adaptif	Banyak Lokal	3 1
Total Skor			21
Peringkat			Madya

Sumber: Yusuf 2020

Tabel 5 Skor nilai penting Gudang PKKD Donggala

Nilai Penting	Kriteria	Nilai Kriteria	Skor Nilai Penting
Sejarah	Konteks	Nasional	3
	Peristiwa	Nasional	3
	Tokoh	Nasional	3
Arsitekural	Gaya	Kompleks	2
	Desain	Kompleks	2
	Konstruksi	Kompleks	2
Estetika	Warna	Selaras	2
	Skala	Selaras	2
	Bentuk	Disharmonis	1
Sosial	Konteks	Nasional	3
Ilmu pengetahuan Pendidikan	Relasi lintas disiplin Makna adaptif	Banyak Nasional	3 3
Total Skor			29
Peringkat			Utama

Sumber: Yusuf 2020

PENUTUP

Penelitian ini berhasil menerapkan model penilaian bangunan yang diduga cagar budaya di Kota Donggala dengan pendekatan kuantitatif sederhana. Pendekatan kuantitatif menggunakan statistik sederhana berupa klasifikasi berdasarkan kelas interval membantu elaborasi nilai penting dari sebuah bangunan yang intrinsik menjadi tampak logis dan rasional.

Hasil dari penelitian menunjukkan total skor dari bangunan kolonial peninggalan Belanda di Kota Donggala. Nilai ini dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi pengajuan status bangunan sebagai cagar budaya menurut peringkat yang diterima. Berdasarkan model asesmen nilai penting yang diajukan diperoleh hasil bahwa kantor PKKD Donggala memiliki total skor 21 dan berperingkat madya. Sementara itu, Gudang PKKD Donggala memiliki total skor 29 dan berperingkat utama.

Dengan adanya alternatif model penilaian nilai penting yang lebih sederhana, maka diharapkan pemerintah lokal, dalam hal ini Dinas Kebudayaan yang berwenang, dapat lebih mudah melakukan asesmen awal terhadap bangunan-bangunan yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tanpa bantuan tenaga ahli. Hal ini penting dilakukan sebab ketiadaan tenaga ahli di bidang arkeologi kerap dijadikan alasan oleh Dinas Kebudayaan, terutama di wilayah luar Pulau Jawa yang jumlah arkeolognya memang minim, untuk menunda melakukan pendataan potensi cagar budaya di wilayah kerja mereka. Pengembangan metode asesmen nilai penting untuk benda diduga cagar budaya yang ingin dijadikan koleksi museum dapat menjadi proyeksi lanjutan dari penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan di Donggala Heritage, organisasi nirlaba yang fokus pada pelestarian bangunan tua di Kota Donggala, karena telah bersedia diajak berdiskusi dan bertukar informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Jamrin. 2013. *Donggala: Donggala'ta dalam Pergulatan Zaman, di Antara Catatan Sejarah dan Budaya yang Terlupakan*. Yogyakarta: Ladang Pustaka.
- Achmadi, Syarif. 2014. "Pemeringkatan Cagar Budaya Tidak Bergerak." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya* 8(1):72-81.
- Asba, Rasyid. 2007. *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaputra, Agara Darma. 2019. "Analisis Elemen Fasad pada Bangunan Kolonial Karya F.D. Cuypers dan Helswit di Kota Cirebon." *Arcade* 3(2):153-60.
- Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hasan. 2000. "Produksi dan Perdagangan Kopra di Donggala 1850-1937." Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Heersink, Christiaan G. 1994. "Selayar and the Green Gold: The Development of the Coconut Trade on an Indonesian Island (1820-1950)." *Journal of Southeast Asian Studies* 25(1):47-69.
- Isnaeni, Mohammad, dan Zulkifly Pagessa. 2013. *Pelabuhan Donggala: Dulu, Kini, dan Nanti*. Donggala: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Donggala.
- Kalman, Harold. 1980. *The Evaluation of Historic Buildings*. Ottawa: Environment Canada Parks Service.
- Lumangino, Wilman Darsono. 2017. "Smokol di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-silang Ekonomi Maritim dan Politik di Masa Transisi, 1947-1967." Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Maulida, Faishal Hilmy. 2018. "Hitam Putih PRRI-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961." *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 8(2):174-85.
- Nadjamuddin, Lukman, Idrus A. Rore, Iskandar Ahmad, Nuraedah, dan Wilman Darsono Lumangino. 2016. *Satu Kota Empat Zaman: Donggala pada Masa Tradisional hingga Terbentuknya Kabupaten*. Yogyakarta: Ombak.
- Nur, Nahdia. 2017. "Jejaring Perdagangan dan Integrasi Ekonomi: Sejarah Ekonomi Sulawesi Bagian Selatan 1902-1930-an." *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada.
- Pearson, Michael, dan Sharon Sullivan. 1999. *Looking After Heritage Places: The Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators*. Melbourne: Melbourne Univ Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Prayudi, Gusti Muhammad, dan Dewi Salindri. 2015. "Pendidikan pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901-1942." *Publika Budaya* 3(1):20-34.
- Purnomo, Hery, Judy O. Waani, dan Cynthia E. V. Wuisang. 2017. "Gaya & Karakter Arsitektur Kolonial Belanda di Kawasan Benteng Oranje Ternate." *Media Matrasain* 14(1):23-33.
- Putranto, Andi, dan Dwi Pradnyawan. 2018. "Model Penelitian Kuantitatif Bangunan Cagar Budaya Kota Surakarta." *Naditira Widya* 12(2):159-72.
- Rasyid, Surayah. 2017. "Permesta Menggugat (Telaah Atas Pemberlakuan Otonomi Daerah)." *Jurnal Al-Hikmah* 19(2):119-34.
- Rim, Junarti, Budi Kristando, Ricky Rumanggit, dan Agung Tribowo. 2012. *Perkembangan Kerajaan Banawa Periode 1900-1911*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Salmi, Jamil. 2003. *Kekerasan dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidharta, dan Eko Budiharjo. 1989. *Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suharjo. 2013. "Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah." *Bulletin Umulolo* 1(3):30-34.
- Sutter, John O. 1959. *Indonesianisasi: Politics in a Changing Economy 1940-1955*. Ithaca: Cornell University Press.
- Yusuf, Sandy Maulana. 2020. "Dampak Bencana Alam terhadap Bangunan Kolonial yang Diduga Cagar Budaya di Kota Donggala." *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.